

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Konsep politik sudah lama berkembang dan bahwa sejarah telah mencatat sejak Plato, salah satu pemikir sepanjang masa dalam *Politeia*¹-nya, memikirkan negara dalam pengertian ini adalah *polis*. Bagi Plato, sebab orang-orang yang hidup dalam polis disebabkan oleh faktor ekonomi. Bahwasannya manusia membutuhkan sesamanya. Tetapi bagi dia, orang-orang yang hidup dalam polis haruslah orang-orang yang mempunyai spesialisasi dalam bidang tertentu, misalnya petani, tukang sepatu dan lainnya. Dengan demikian, konsep Plato tentang negara dibagi dalam tiga bagian. Golongan pertama ialah penjaga-penjaga yang sebenarnya ialah para filsuf, karena mereka mempunyai pengertian tentang yang baik. Merekalah yang dipercayakan untuk memimpin negara. Golongan kedua adalah pembantu-pembantu dan prajurit. Mereka ditugaskan menjamin keamanan negara dan mengawasi supaya para warga negara tunduk kepada para filsuf-filsuf. Golongan terakhir terdiri dari para petani-petani dan tukang-tukang yang menanggung kehidupan ekonomis bagi seluruh polis. Segala sesuatu dalam polis ini bersifat milik bersama. Golongan satu dan dua tidak boleh memiliki keluarga. Mereka boleh kawin dengan siapa saja untuk menghasilkan keturunan.² Pada posisi ini, terlihat jelas bahwa segala sesuatu itu bersifat publik. Konsep negara diyakini Plato sebagai super keluarga yang menyerap keluarga konkret kedalamnya. Maka tidak ada hal yang bersifat privat.

¹Acry Deo Datus, *Filsafat Politik*, (Maumere: Ledalero, 2013), hlm. 133-134. *Politeia* merupakan karya utama Plato dalam filsafat politiknya tentang negara. Karya itu memuat pikiran Plato tentang negara dan hukum. Ada pula karya lain yang masih berhubungan dengan hukum yakni *Politikos* atau *Nomoi*.

²Prof. Dr. K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 140-147.

Namun pemikiran Plato ini tidak dapat terealisasi dalam kenyataannya sebab Plato menggambarkan sebuah negara atau masyarakat pada suatu tempat yang belum pernah ditinggali dan belum pernah ada. Konsep tersebut hanya ada dalam pikiran/ide.³ Sebab bagi Plato, dalam bukunya Filsafat Politik Acry Deo Datus mengungkapkan bahwa Plato tidak percaya pada realitas empiris sebagai kebenaran. Menurut Plato, negara atau polis ideal itu harus melampaui dunia empiris dan historis. Jadi realitas yang sesungguhnya ada didalam ide.

Aristoteles mengubah cara pandang ini dengan bertitik tolak pada dunia empiris. Bahwa pikiran tentang negara ideal Plato merupakan aktivitas intelektual yang bagus namun tidak memadai untuk urusan keseharian. Pada bagian ini, Plato yang pada awalnya tidak mementingkan *oikos*, diangkat lagi oleh Aristoteles. Aristoteles mulai membedakan antara *oikos* (rumah tangga) dan *polis*(negara kota) sebagai susunan politis dalam masyarakat. Dua aspek sosial ini hadir sebagai dua kutub yang berlawanan. Dalam *oikos*, berlaku relasi antara menguasai dan dikuasai, antara laki-laki dan perempuan, antara tuan dan budak, antara budak dan kerbau. Rumah tangga merupakan sebuah lingkup keniscayaan;relasi antara laki-laki dan perempuan terjalin demi pembiakan dan hubungan tuan dan budak demi pertahanan hidup. Dengan ini, maka Aristoteles berbicara tentang keluarga empiris yang terdapat dalam masyarakat.

Seorang filsuf perempuan yang hidup pada masa ketika Nazi dan Stalin sedang berkembang pesat tertarik pada konsep Aristoteles ini, lalu menyulingnya menjadi pemikiran politis. Bahwa lebih dari sekedar kehidupan keluarga konkret, *oikos* dipahaminya sebagai modus sosialisasi pra-politis suatu masyarakat. Sebab berkaitan dengan kuasa dan menguasai yang

³Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 58.

hanya terdapat di dalam ruang privat. Sifatnya *apolitis*. Berbeda dari sosialis dalam *oikos* yang tertanam dalam ruang privat, *polis* hadir sebagai ruang publik yang terbentuk dari relasi-relasi isonomis para warganya yang bersuara lantang yang menyuarakan aspirasinya. Sedangkan didalam *polis*, manusia mewujudkan tindakannya demi kepentingan hidup bersama. Polis merupakan wahana penampakan diri dalam komunikasi antar sesama warga, dengan bahasa sebagai sarana.

Bertolak dari tradisi antik itu, Hannah Arendt, filsuf berdarah Yahudi ini membangun pemikirannya dengan menjadikan tiang penyangga untuk bangunan pemikiran politisnya. Arendt membedakan antara yang politis dan yang non-politis. Yang politis-karena dimungkinkan oleh pemakaian bahasa dan tindakan manusia (*anthropos zoon logon echon*) -adalah lingkup kebebasan. Baginya bersifat politis berarti hidup dalam polis, sebab didalam polis ada kebebasan dan hidup merupakan hal yang satu dan sama. Dengan demikian berarti segala sesuatu diatur dalam kata-kata yang meyakinkan dan tidak melalui paksaan dan kekerasan. Memaksa orang lain dengan kekerasan, memerintah dan bukannya dengan meyakinkan, oleh orang Yunani dianggap sebagai cara pergaulan para anggota rumah dan keluarga yang dipimpin secara depotis oleh kepala keluarga. Dan yang non-*polis* ialah lingkungan dalam hubungan ekonomis, yaitu segala ikatan tuan-budak, laki-laki-perempuan yang berada didalam *oikos*. Singkatnya bahwa apa yang terjadi, berkisar pada wilayah dominasi yang satu kepada yang lain. Bagi Arendt, yang politis atau yang publik itu sungguh akan tetap ada ketika tidak dicampuri oleh ruang privat atau tidak adanya kolonisasi ruang publik oleh ruang privat. Yang privat itu dan non politis itu misalnya ekonomi, agama, komunitas etnis dst.

Hingga sekarang politik itu penting, tetapi acap kali dipandang serba negatif. Hal itu tampak dalam ungkapan-ungkapan yang seringkali terlontar, bahwa politik itu kotor, politik itu

kejam, tak ada sahabat dalam politik. Atau dalam kumpulan pidato Bung Kanis, beliau mengatakan bahwa berpolitik praktis itu berarti bertarung dengan kursi dan kuasa, dan bahwa politik itu kotor tapi indah, licin tapi menarik, sulit tapi wajib, berbahaya tetapi mempesona. Berpolitik praktis itu masuk bersilat taktik dan strategi, dengan akibatnya satu; siapa yang salah buka langkah, ia akan terlempar keluar.⁴ Pandangan-pandangan ini kemudian menempatkan politik seringkali sebagai tindakan strategi, juga seperti yang pernah dikonsepsikan oleh Niccolo Machiaveli(1469-1527), atau Thomas Hobbes(1588-1678), atau, Max Weber(1864-1920) atau juga Carl Smith(1888-1985) yang memaknai tindakan politis sebagai bentuk pemaksaan kehendak oleh penguasa terhadap obyek kekuasaannya dengan cara apapun. Pemegang kedaulatan ialah siapapun yang mampu menentukan dalam keadaan darurat, sehingga situasi kacau-balau dan hiruk-pikuk politik selalu dibuat penguasa demi melanggengkan kekuasaannya. Dengan ini, maka kancah politik akhirnya dianggap kotor dan negatif karena sikap manipulatif menjadi lumrah didalamnya. *Homo homini lupus, belum omnium contra omnes, clash of civilizations*⁵ menjadi pegangan dalam berpolitik untuk berjaga dan menyerang. Dengan ini pastinya adanya pertanyaan yang muncul bahwa sekejam itukah politik, dan mungkinkah ada makna lain dari politik yang bertolak dari kesetaraan manusia sehingga meluputkan para pelaku politik?

Hannah Arendt, filsuf perempuan yang telah disebutkan, hadir dengan refleksinya yang berbeda. Dalam *Human Condition*-nya, ia merefleksikan makna politik yang sungguh lain. Bertolak dari pandangan antik Aristoteles, Arendt menguraikan bahwa politik itu merupakan

⁴Kanis Pari, ***Jangan Takut Berpolitik***, (Jakarta: Bank Naskah Gramedia, 2004), hlm. xxxi.

⁵*Homo Homini Lupus (Manusia Adalah Serigala Bagi Sesamanya)*, dan *Bellum Omnium Contra Omnes (Perang Semua Melawan Semua)* merupakan dua istilah Thomas Hobbes untuk menolak pandangan bahwa manusia sejak semula bersifat sosial sambil menegaskan bahwa kecondongan kodrati manusia adalah mempertahankan diri. Sedangkan *clash of civilizations (benturan peradaban)* merupakan tesis Samuel Huntington yang populer di penghujung abad ke 20.

aktivitas orang-orang yang bebas dan setara yang saling berkomunikasi. Bagi Arendt, politik diterjemahkan sebagai aktivitas komunikatif yang terjadi diantara dan diluar manusia-manusia yang plural. Di dalam aktivitas komunikatif, ada kebebasan, dan kekuasaan yang lahir dari rahim tindakan (*action/praxis*)serta ucapan (*speech/lexis*). Antara tindakan dan ucapan atau berbicara sama-sama memiliki aspek penyingkapan diri pelaku. Keduanya merupakan aktivitas politik. Tindakan dibutuhkan sebab melalui tindakan seseorang mampu untuk memulai sesuatu yang baru sedangkan berbicara terkait erat dengan fakta keunikan dan keberbedaan atau fakta pluralitas. Bahwa orang berbicara karena satu sama lain berbeda. Sehingga melalui berbicara segala sesuatu didamaikan. Seperti yang ditulis Arendt dalam *Human Condition* bahwa, pluralitas manusia merupakan kondisi dasar dari tindakan dan ucapan manusia serta berkarakter ganda yaitu sebagai persamaan dan perbedaan. Persamaan yang dimaksudkan adalah bahwa setiap manusia sama karena memiliki perbedaan, dan dengan perbedaan tersebut setiap orang dibedakan dari yang lain. Jika seorang tidak setara, mereka tidak pernah bisa memahami orang lain dan bila manusia tidak berbeda, setiap orang tidak dapat dibedakan dari yang lain. Maka bila semua manusia sama, diantara mereka tidak tercipta komunikasi dan tidak dibutuhkan komunikasi.⁶

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa menurut Hannah Arendt, politik merupakan aktivitas komunikatif berupa penampilan diri kepada orang lain, sebagai satu-satunya aktivitas yang menjadikan manusia sungguh manusia dan menjamin seseorang berada dalam pengalaman akan realitas dunia.

⁶Hannah Arendt, *The Human Condition*, (London: The University of Chicago, 1998), hlm. 175.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengulas secara lebih mendalam konsep POLITIK SEBAGAI AKTIVITAS KOMUNIKATIF MENURUT HANNAH ARENDT.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini penulis mengemukakan beberapa pokok masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dan menjaga agar penulisan ini tidak melebar. Rumusannya demikian:

1. Apa itu politik!
2. Apa itu konsep Politik sebagai aktivitas Komunikatif menurut Hanna Arendt!
3. Bagaimana konsep politik itu berelevansi dengan dunia sekarang?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisannya maka dapat dirumuskan beberapa tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Mendalami konsep politik dari beberapa filsuf.
2. Mencerna secara baik konsep Politik sebagai aktivitas Komunikatif Hannah Arendt.

1.4 Kegunaan Penulisan

1.4.1 Bagi Civitas Akademika Fakultas Filsafat

Tulisan ini penting untuk mencerna ulang pengertian politik yang selama ini telah di deparpolisasi dan dipolitisasi sehingga berkonotasi jelek dengan demikian menghasilkan mahasiswa yang berkualitas dengan lumbung pengetahuan yang benar dan tepat.

1.4.2 Bagi Pendidikan Calon Imam di Seminari Tinggi

Lewat tulisan ini, diharapkan agar para calon imam dapat belajar untuk berusaha memaknai politik bukan sebagai perihal yang bernada busuk dalam kegiatan politik praktis dengan demikian jargon *Pro Ecclesia Et Patria* tetap menggema dengan lantang.

1.4.3 Bagi Peneliti

Tulisan ini secara langsung sangat berguna bagi pengembangan diri penulis karena menambah wahana berpikir dan pemahaman yang benar tentang konsep politik dan berani untuk menjalankan politik dalam nuansa praktis, sehingga lambat laun akan terwujud juga *bonum comune* bukan saja dari para pemimpin tetapi juga dari para warga dalam hal ini adalah saya sendiri.

1.4.Sistematika Penulisan

Penulisan ini secara sistematis terstruktur dalam lima bab, dimulai dengan Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang yang memotivasi penulis untuk memilih topik ini sebagai judul, rumusan masalah, metodologi yang digunakan dalam proses penulisan ini, tujuan dan kegunaan penulisan, serta sistematika penulisan.

Pada Bab II, penulis mengurai biografi intelektual singkat Hannah Arendt, karya-karya serta latar belakang intelektual dan sosial politik Hannah Arendt. Bab III, pada bagian ini, penulis menguraikan konsep penting dalam pemikiran Hannah Arendt yakni konsep Yang Politis dan Non Politis.

Dalam Bab IV, penulis secara spesifik mengurai judul tulisan ini yakni, Konsep Politik sebagai Aktivitas Komunikatif Menurut Hannah Arendt. Dalam bab ini, penulis mengurai secara tuntas tentang aktivitas komunikatif sebagai aktivitas politis.

Akhirnya, dalam Bab V sebagai penutup, penulis berupaya melihat dan menguraikan implikasi pemikiran politik Hannah Arendt bagi perkembangan konsep Politik di Indonesia. Selanjutnya, dalam bagian ini juga, penulis memberikan tanggapan-tanggapan kritis atas pemikiran Hannah Arendt.